

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014 Tentang Desa maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada sumber daya aparatur (Chyntia, 2012).

Upaya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas harus dimulai pada tingkat pemerintahan Desa, dengan asumsi bahwa kualitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung dari kualitas sumber daya manusianya. Kepala Desa yang merupakan kepala pemerintahan ditingkat Desa diharapkan mampu menjalankan pemerintahan dengan performa yang baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga apabila aparat pemerintah pada tingkat Desa menunjukkan kinerja yang bagus dalam menyelenggaraan pemerintahan, maka akan berpengaruh pada kinerja pemerintah pada tingkat Kabupaten, Propinsi hingga Pusat (PP No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Usaha untuk mencapai pemerintahan yang baik ini melahirkan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan di Desa. Salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan yang

mengemukakan bahwa tugas dan kewajiban yang paling utama untuk Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Bila ini dapat terlaksana dengan baik, maka tugas dan kewajiban yang lainnya sudah dapat terlaksana dengan baik pula. Sebab dalam Pemerintahan telah mencakup dan mengatur semua bidang, baik bidang sosial kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang politik dan keamanan maupun bidang hukum.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat desa sehingga kinerja kepala desa sebagai pemerintah desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa, namun pada kenyataannya dari hasil observasi diketahui bahwa kinerja masing-masing kepala desa di wilayah Kecamatan Tilongkabila dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat berbeda-beda.

Kinerja kepala desa disebabkan oleh banyak faktor diantaranya tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Tingkat pendidikan kepala desa yang dimaksud adalah pendidikan formal (pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi). Menurut Notoatmodjo (2010) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki. Selain tingkat pendidikan, kinerja kepala desa sebagai aparatur pemerintahan desa juga dipengaruhi oleh pengalaman kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desanya. Kepala desa yang sudah lama bekerja sebagai kepala desa akan lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang baru bekerja sebagai kepala desa, dan

dengan pengalaman tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya sebagai aparatur pemerintahan Desa.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan informasi bahwa dari 14 desa di wilayah Kecamatan Tilongkabila pada tahun 2014 memiliki kinerja yang berbeda-beda. Ada beberapa desa seperti desa Tamboo, Bongoime, Motilango, Tunggulo dan Tunggulo Selatan kinerja kepala desanya tergolong baik sedangkan di beberapa desa lainnya seperti desa Lonuo, Butu, Iloheluma, Moutong, Toto Utara, Permata, Berlian, Bongohulawa, Bongopini, kurang baik. Ditinjau dari tingkat pendidikan diketahui bahwa dari 14 kepala desa hanya dua kepala desa yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sedangkan kepala desa lainnya memiliki tingkat menengah dan dari 14 kepala desa di Kecamatan Tilongkabila terdapat 5 desa yang kepala desanya sudah menjabat dua periode yakni desa Tamboo, Lonuo, Bongoime, Tunggulo Selatan, Butu.

Sehubungan dengan hal di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Wilayah Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yakni:

- a. Tingkat pendidikan kepala desa di wilayah Kecamatan Tilongkabila bervariasi dan sebagian besar berpendidikan menengah.

- b. Dari 14 desa terdapat 5 desa yang kepala desanya sudah menjabat dua periode sehingga memiliki pengalaman yang lebih baik sebagai kepala desa.
- c. Kinerja kepala desa di Kecamatan Tilongkabila berbeda-beda.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut: Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja kepala desa di Wilayah Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja kepala desa di Wilayah Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ditinjau dari sudut pendekatan keilmuan sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan perbandingan untuk penyusunan karya ilmiah.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah Kecamatan Tilongkabila untuk meningkatkan kinerja kepala desa di wilayah kerjanya.